

**KEMITRAAN PEMASARAN SEBAGAI SARANA PENGENTASAN  
KEMISKINAN: IDE, LANGKAH DAN PELAKSANAAN KASUS DI  
PANGKALAN PENDARATAN IKAN JUWANA, KABUPATEN PATI  
JAWA TENGAH**

(Marketing Partnership) as a Means of Poverty Eradication: idea, Steps to Take  
and Implementation. a Case of Juwana Fishery Landing Point.)

**Suharno**

Dep. Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen-IPB

**ABSTRAK**

Makalah methodologis ini menyajikan ide penggunaan kemitraan pemasaran bagi pengentasan kemiskinan nelayan. Ide lahir sebagai respons atas gejala kemiskinan nelayan yang prevalen di Indonesia. Sebagai langkah awal, diadakan penelitian yang bertujuan (1) mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi nelayan, (2) menjangkau aspirasi *stakeholders* tentang Model kemitraan dalam rantai pasokan dan (3) merumuskan model prototype pengentasan kemiskinan berbasis kemitraan dalam rantai pasokan komoditi perikanan rakyat (*SCM Model*). Penelitian selama 5 bulan tahun 2009 menggunakan data primer dari 81 responden ditetapkan menggunakan *stratified purposive sampling methods*. Selain itu penelitian menggunakan data sekunder. Methoda pengumpulan data meliputi wawancara, FGD dan observasi. Analisis meliputi analisis pendapatan dan belanja, efisiensi rantai pasokan dan analisis kelembagaan ekonomi. Tipikal masyarakat nelayan terdiri dari anak buah kapal (ABK), nahkoda, pemilik dengan ragam pendapatan yang tajam. ABK dan pendega paling rentan terhadap resiko kemiskinan dan adanya peluang pengentasan kemiskinan melalui manajemen belanja. Ada 9 (sembilan) pelaku dan terdapat 4 (empat) pola distribusi bagi komoditi hasil tangkapan dengan efisiensi masih bisa ditingkatkan. Kemitraan perlu memasukkan Tempat Pelelangan Ikan, nelayan pemilik, bakul (pedagang besar maupun kecil), industri pengolahan, industri penyimpanan dingin, KUD Mina, dan pihak penyandang dana atau investor sebagai peserta. Model kemitraan bisa dicapai melalui revitalisasi mekanisme kerjasama yang ada, dibanding harus menciptakan model baru. Model kemitraan menyebutkan jumlah *stakeholders*, *governance*, dan mekanisme kemitraan. Sebagai langkah awal penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian uji coba dan implementasi model.

Kata kunci: Isiensi pemasaran, analisis pendapatan, pengentasan kemiskinan, kemitraan pemasaran.

**ABSTRACT**

This article presents an idea of using marketing partnership for poverty eradication. As a first step a research was conducted (1) to describe socio-economic conditions of the fisher community, (2) to tap stakeholder perceived need of marketing model of supply chain partnership and (3) to set up a prototype model of marketing partnership as a means of poverty eradication (SCM Model). The research used primary data (81 respondents) chosen with stratified purposive sampling methods. In addition, the research elaborated secondary data. Data collection methods includes interviews, GD and observation. Three analysis applied are income analysis, marketing efficiency, and economic institution analysis. There are three groups of fishery community: ship owners, captains, and crews with different income level and vulnerability to poverty. Crews and small ship owners are vulnerable to poverty.

Spending management is an option for poverty eradication in fisher community. There are 9 economic agents (income earners) and 4 distribution channels in the supply chains of fish catches. Marketing partnership model can be established by revitalising the existing one. The partnership should bring fish auction unit (TPI), fish collectors (bakul), fish processors, cold storages, fishery cooperatives, and the independent investors to be parties in the partnership. The marketing partnership model contains an arrangement of stakeholder roles, chain governance, transaction mechanism. This research looks forward to continuing steps of tryout and model implementation.

Keywords : Marketing efficiency, income analysis, marketing partnership, poverty eradication.

## PENDAHULUAN

Bentuk kompromistis dua arus besar pemikiran pemberantasan kemiskinan (neo liberal dan sosial demokrat (Chambers, 1995 dalam Suharto, 2009) menunjukkan perlunya pengakuan terhadap kekuatan individu dan kelembagaan sosial sebagai pendekatan mengurangi kemiskinan. Kompromi itu menghasilkan dua prinsip panduan dalam penanggulangan kemiskinan (Suharto, 2009): (1) Prinsip melahirkan kelembagaan yang memungkinkan kerjasama antar individu, terjadinya redistribusi pendapatan, vertikal maupun horisontal. (2) Strategi penanggulangan kemiskinan perlu memberi ruang bagi perbaikan kapasitas diri secara perorangan berupa ruang penyaluran pendapat dan penguatan keterampilan. Di samping itu, perlu dikondisikan secara institusional melalui intervensi negara perubahan fundamental pola pendistribusian pendapatan: Dengan kata lain penanggulangan kemiskinan menghadirkan insentif bagi terjadinya redistribusi antar individu. Itu berarti semua pihak merasa mendapatkan manfaat perubahan yang diciptakan. Berangkat dari prinsip ini, lahir pemikiran akan pola kemitraan di sepanjang rantai pasokan ikan sebagai sarana perbaikan kesejahteraan,

Tulisan ini menyajikan penggunaan model kemitraan pemasaran sebagai sarana pengentasan kemiskinan. Ide pembentukan model kemitraan pemasaran dilatarbelakangi oleh fakta masih tingginya tingkat kemiskinan nelayan di tengah kekayaan sumberdaya laut dan perairan Indonesia. Kontras ini bisa dilihat pada fakta 1: Indonesia memiliki 17.508 buah pulau, memiliki luas laut sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> dan bentangan garis pantai sepanjang 81.000 Km<sup>2</sup>) dengan segala potensi

---

<sup>2</sup> Ini merupakan informasi resmi yang masih menjadi sumber rujukan penulisan ilmiah.

ekonominya. Tetapi (fakta 2) masyarakat pesisir<sup>3</sup> di Indonesia masih tergolong sebagai kelompok masyarakat yang paling miskin. Ini bisa dilihat pada pernyataan Saad (2005) diacu dalam Asianto (2007). Disebutkan bahwa prevalensi kemiskinan masyarakat pesisir yang mendiami 8.090 desa dan diperkirakan berjumlah 16,42 juta jiwa. Dengan kriteria batas kemiskinan yang lebih ekstrem, angka itu bisa jauh lebih besar. Fakta 3 menyebutkan bahwa perbaikan kondisi ekonomi, dan karenanya pengentasan kemiskinan bisa dicapai melalui perbaikan struktur ekonomi yang berlaku di wilayah setempat.

Sebagai bagian penting dalam langkah perumusan tujuan penelitian adalah: (1) mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi nelayan, (2) Menjaring aspirasi *stakeholders* tentang MODEL kemitraan dalam rantai pasokan dan (3) bmerumuskan model prototype pengentasan kemiskinan berbasis kemitraan dalam rantai pasokan komoditi perikanan rakyat (*SCM Model*).

## METODE PENELITIAN

Data penelitian diambil dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Juwana, Kabupaten Pati Jawa Tengah, bulan Juni hingga Desember 2009. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer ditetapkan berdasarkan *stratified purposive sampling methods* dengan kriteria keterwakilan, ketersediaan waktu, dan ketersediaan sumber dana. Jumlah responden adalah 38 ABK, nelayan pendega, 9 nahkoda, pemilik kapal 11, pedagang pengumpul 5, pengolah 10, jumlah total 75 orang. Ditambah responden dari kalangan birokrat, wakil asosiasi nelayan dan aparat pelelangan jumlah menjadi 81 orang responden. Data sekunder yang dikumpulkan saat kunjungan lapang. Methoda pengumpulan data meliputi wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta pengamatan, menggunakan instrument penelitian berupa kuestioner, panduan wawancara, dan panduan FGD.

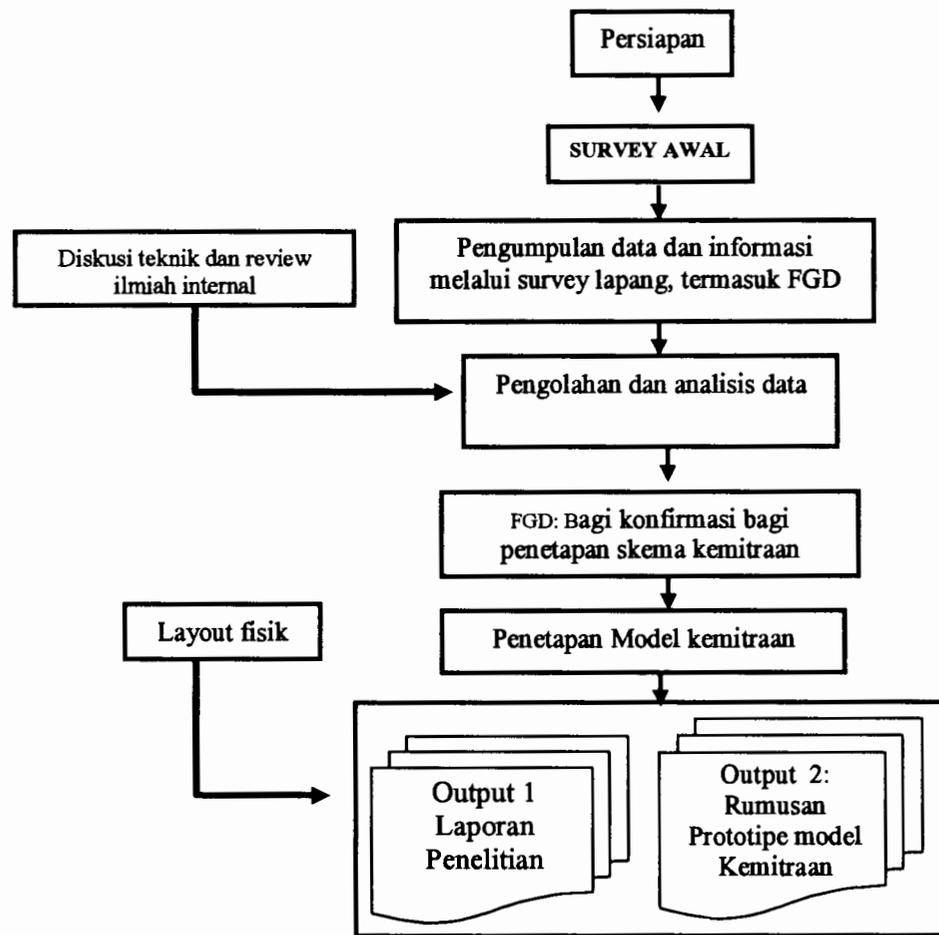
---

<sup>3</sup> Secara khusus, yang dimaksud dengan masyarakat pesisir di sini adalah kelompok orang yang tinggal di wilayah pesisir baik di tepi pantai pulau kecil maupun pulau besar, terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut serta masyarakat lainnya yang kehidupan sosial ekonominya tergantung pada sumberdaya kelautan.

Tabel 1. Daftar Data/Informasi dan Metode Pengumpulannya

No	Data Dan Informasi		Sumber/ Nara Sumber	Metode Pengumpulan Data Yang Digunakan		
	Primer	Sekunder		Survey	Observasi	Kualitatif
1	Harga	harga	Nelayan, pedagang, restoran, rumah tangga, laporan TPI, Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan	√	√	√
2	Biaya		Nelayan, pedagang	√	√	√
3		Undang-undang dan peraturan	Pemerintah, daerah, pusat BAPPEDA, BPS, Dis-KP	√		
4		Assosiasi	Assosiasi	√		√
	Sarana/prasarana		Instansi/publik		√	
5	Produksi		Nelayan	√	√	
6	Pengolahan		Pengolah, pedagang	√	√	
7	pengangkutan		pedangang	√	√	
8	Transaksi		Nelayan, pedagang, rumah tangga	√	√	
9	Penanganan distribusi		Pedagang	√	√	
10	Pengamanan		Pedagang	√	√	
11	Analisis ahli					√

Analisis data yang diterapkan meliputi analisis efisiensi (pemasaran), analisis pendapatan dan konsumsi dan analisis kelembagaan ekonomi. Perbandingan antara nilai margin, biaya dan resiko ini nantinya secara total akan menunjukkan apakah sistem distribusi yang ada sudah efisien atau belum. Hasil analisis pendapatan dan konsumsi akan menunjukkan tingkat kerentanan masyarakat akan kemiskinan dan potensi perbaikannya. Analisis kelembagaan menunjukkan efektivitas kerja kelembagaan yang ada dan mengarahkan model kemitraan pemasaran apa yang bisa dibangun. Melalui diskusi partisipatif dengan para pihak dalam *Focused Group Discussion* dan *judgement* ilmiah ditetapkan model optimal kemitraan pemasaran yang sedang diusahakan. Setelah dirumuskan dan diujicobakan akan diperoleh gambaran ideal mengenai bentuk kemitraan pemasaran yang siap diterapkan di tempat lain (replikasi). Tahap replikasi merupakan tahap penelitian berikutnya (gambar 1)



Gambar 1. Tahapan Perumusan Hasil

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keadaan Umum

Juwana, kecamatan di Kabupaten Pati berpotensi ekonom beragam. Selain perikanan (sector penting, lihat Tabel 2) Juwana diuntungkan secara administratif sebagai ibukota eks Kawedanan, dengan mempunyai beberapa keistimewaan dibanding dengan kecamatan lain di masa kini: Sarana pemerintahannya relatif lengkap. Terletak di jalur *Pantura* antara Pati dan Kabupaten Rembang, Juwana menjadi lebih dikenal dibanding kota kecamatan lain, karena aksesnya. Keberadaan pelabuhan memperkuat posisi ekonomi Juwana.

Tabel 2. Deskripsi Sektor Perikanan Kecamatan Juwana unit Bajomulyo

No	Uraian	Jumlah	
		2006	2008
1.	Nelayan (orang)		
	a. Juragan	750	717
	b. Pandega	2.031	2031
2.	Kapal Motor/Motor Tempel		
	a. Kapal motor besar	93	93
	b. Kapal motor mini	189	189
	c. Kapal tempel besar	143	143
	d. Kapal tempel sedang	299	299
	e. Kapal tempel kecil	111	111
3.	Alat Tangkap Ikan		
	a. <i>Purse seine</i>	93	93
	b. Dogol		
	c. Bundes/Krikrit		
	d. Jaring insang monofilament	210	210
	e. Jaring insang multifilament		
	f. Jaring insang trammel pejer	249	249
	g. Jaring trammel	151	151
	h. Jaring cantrang	40	40
	i. Pancing rawai	107	107
	j. Jala		
4.	Tempat Pengawetan Ikan		
	a. Esesan	10	10
	b. Gereh	7	7
	c. Pindang	16	16
	d. Presto	13	13
	e. Panggang	26	26
	f. Krupuk ikan	21	21
	g. Terasi	2	2
	h. Lain-lain	5	5

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2006, 2009

### Pola Pendapatan dan Konsumsi

Hasil Penelitian pendahuluan (Suharno dan Farmayanti, 2009) menunjukkan ada tiga strata dalam masyarakat nelayan di Juwana: yaitu pemilik kapal, nahkoda, dan anak buah kapala yang terdiri dari juru mudi, *motorist* dan anak buah kapal biasa. Pendapatan semua strata ber pola musiman, mengikuti musim penangkapan ikan. Pemilik kapal besar dan kecil (pendega) berbeda signifikan dalam pendapatan. Nelayan pendega atau nelayan pantai adalah pemilik perahu penangkapan berjelajah lebih kurang 2 mill dari pantai.

Menggunakan pendapatan sebagai *proxy* kesejahteraan, ditemukan bahwa dua strata didalam masyarakat nelayan: ABK dan pendega merupakan strata yang

rentan terhadap kemiskinan. Namun masyarakat nelayan di Juwana secara rata-rata tidak tergolong miskin. Disamping itu pola konsumsi nelayan juga memiliki potensi rentan terhadap kemiskinan. Karenanya ada kebutuhan pembinaan dalam manajemen belanja sebagai salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan. Temuan lain mengindikasikan bahwa nilai tukar nelayan di Juwana tergolong baik, berarti kegiatan penangkapan mampu membiayai pengeluaran keluarga nelayan untuk barang dan jasa yang diproduksi di luar kegiatan penangkapan.

### **Pola Distribusi Hasil Perikanan dalam Rantai Pasokan**

Kajian rantai pasokan menghasilkan kesimpulan berikut (Suharno dan Farmayanti, 2009): (1) Ada 4 pola rantai pasokan hasil perikanan tangkap yaitu:

Pola - 1: nelayan → ke perusahaan pembekuan/penyimpanan dingin → eksportir.

Pola - 2: nelayan → TPI → perusahaan penyimpanan dingin → ekspor.

Pola - 3: nelayan → TPI → pengolah (pengasin, pemindang, pengasap, *fillet*) → pedagang besar → distributor → pengecer (dalam atau di luar kota) → konsumen.

Pola - 4 : (nelayan → pengumpul → pedagang besar → distributor (ke dalam atau luar kota) → pengecer → konsumen. (2) rantai pasokan dinilai kurang efisien, dilihat dari bagian nelayan (*fisher share*) masih kurang dari 50% dari total harga yang dibayarkan konsumen. (3) inefisiensi layanan di pangkalan pendaratan ikan dan TPI menjadi penyebab dari kurang efisiennya (4) Belum ada komodisasi kepentingan, di sepanjang rantai pasokan dan kepentingan ABK belum sama sekali terakomodasi. (5) Organisasi atau individu yang terlibat di sepanjang rantai pasokan adalah: Pedagang pengumpul besar, Bakul pengumpul kecil, Pengolah pemindangan, Pengolah pengasapan, Pengolah pengasinan, Penampung besar (di Juwana atau di luar kota), Pengusaha penyimpanan dingin (utamanya di Juwana) Eksportir (di Juwana atau luar kota) Hotel dan restoran (di Juwana atau luar kota).

### **Kajian Kelembagaan Ekonomi**

Kajian kelembagaan ekonomi juga menunjukkan ada kebutuhan MODEL kemitraan baru, atau hasil revitalisasi model, dengan melibatkan kepentingan

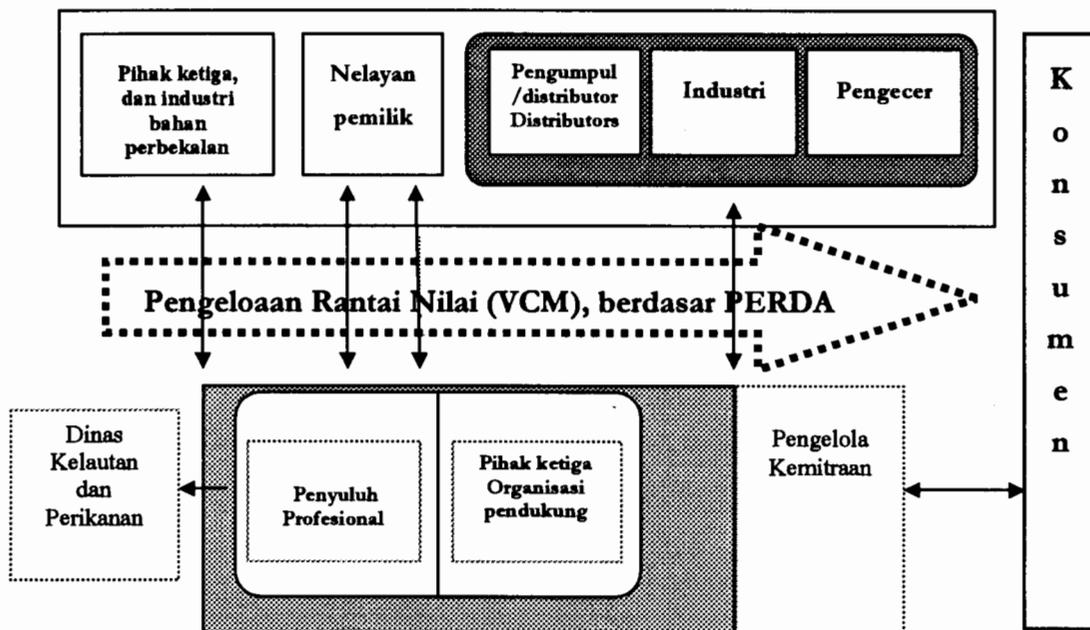
ABK dan pendega (Suharno dan Farmayanti, 2009) disamping Tempat Pelelangan Ikan, Nelayan pemilik, Bakul (pedagang besar maupun kecil), Industri pengolahan, Industri penyimpanan dingin, KUD Mina, investor, dan penjamin mutu sanitasi TPI.

### **Perimbangan dalam Merancang Model Kemitraan Pemasaran**

Faktor-faktor berikut mendesak untuk menjadi pertimbangan dan dimasukkan dalam ketentuan kemitraan dimaksud: (1) Anak buah kapal (ABK), pendega (nelayan pemilik kapal kecil, berjarak jangkau 2 mill) merupakan kelompok yang paling rentan terhadap resiko kemiskinan. Untuk itu perlu dibuat pola bagi hasil baru yang memungkinkan adanya jaminan pendapatan saat ABK tidak melaut. (2) Manajemen belanja keluarga bisa menjadi faktor penentu bagi perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan. (3) TPI memegang peran kunci bagi perbaikan harga, pencatatan data produksi, yang pada gilirannya akan bisa menjadi bahan akurat untuk menilai kandungan sumberdaya kelautan dan perikanan. (4) Namun TPI mengalami kemunduran peran, ditandai dari menurunnya produksi ikan yang menggunakan PPI dan TPI Juwana sebagai tempat berlabuh dan pelelangan dan Peran KUD Mino Saron Mino tidak bekerja sesuai dengan harapan sesuai asasnya, yakni mewakili kepentingan anggota. (4) Banyak lembaga ekonomi namun semangat komersial dan tidak lenturnya persyaratan menjadi penghambat bagi warga nelayan yang rentan terhadap resiko kemiskinan, (5) Peran bakul cukup dominan dalam membentuk struktur pasar yang kurang kompetitif dengan dampak perburukan ekonomi nelayan. Ini terdeteksi dalam bentuk cara penentuan harga dan keterlambatan pembayaran di TPI. (6) TPI tidak mampu membayar *cash* pada nelayan, menyebabkan ketat dan sulitnya arus tunai di pihak nelayan pemilik.

Mempertimbangkan faktor faktor di atas, maka rancangan kemitraan rantai pasokan harus memuat ketentuan berikut: (1) TPI dikembalikan sebagai pelaksana lelang dan penjamin mutu fisik pasar lelang, penjamin arus tunai ABK dan pendega (2) KUD Mina perlu melayakkan nelayan ABK, bakul dan pengolah yang menjamin pelaksanaan pembayaran *cash* kepada nelayan pemilik setelah pelelangan, terutama bagi pendega yang melelang ikannya. KUD Mina adalah

penjamin informasi pasar secara transparan bagi para anggota. (3) TPI dan KUD Mina menjamin bahwa nelayan pemilik mematuhi pola bagi hasil baru yang menjamin ABK mendapat jaminan hidup saat tidak melaut. (4) Peserta lelang (pembeli) wajib menyerahkan agunan (*caution*) penjamnin pembayaran tunai. (5) TPI lebih menjamin kesehatan ikan dan lingkungan. (6) diperlukan produk legislasi yang bisa memayungi secara hukum fungsi dan pendanaan peran TPI. (7) Ada ruang bagi penyandang dana dalam kemitraan (8) Dinas Kelautan dan melakukan pembinaan berlandaskan PERDA setempat. Gambar 2 merangkum model yang diajukan.



Gambar 2. Model Kemitraan dalam Rantai Pasokan Perikanan Rakyat

## KESIMPULAN

Membangun model kemitraan adalah kegiatan manajerial yang berbasis ilmu pengetahuan dan informasi. Oleh karena itu dalam melaksanakannya selain pemahaman mengenai taktik manajerial, perlu didukung oleh temuan ilmiah yang berbasis data yang valid. Artikel ini mendemonstrasikan bahwa sebelum langkah-langkah manajerial diterapkan, seorang perancang perlu melakukan penelitian

dasar yang akan memberikannya informasi valid mengenai issue yang sedang akan dirancang.

Dalam kasus perancangan model informasi yang perlu dihasilkan oleh penelitian ilmiah adalah informasi mengenai pola pendapatan, efisiensi distribusi dalam rantai pasokan dana informasi tentang kinerja kelembagaan yang ada. Setelah informasi dimaksud bisa dikumpulkan secara valid oleh perancang, baru langkah-langkah manajerial dijalankan.

Dalam kasus PPI Juwana model kemitraan dirancang dengan melakukan revisi atas pola lama yang ada, dengan menambah pengaturan baru yang memungkinkan insentif tersebar merata pada peserta kemitraan.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Apresiasi penulis kami tujukan kepada Direktorat Penelitian dan Pengembangan, DIKNAS yang melalui LPPM IPB telah memungkinkan terlaksanakannya ide perumusan model kemitraan pemasaran ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim peneliti Model Kemitraan dalam Rantai Pasokan Komoditi Perikanan Tangkap Rakyat yang menjadi dasar penulisan artikel ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asianto, S. Analisis Pendapatan Masyarakat Pesisir dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Kasus : Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Skripsi. Program Sarjana Institut Pertanian Bogor. 2006.
- Suharno, Narni Farmayanti: Model Kemitraan dalam Rantai Pasokan Komditi Perikanan Tangkap Rakyat. 2009 (*unpublished*)
- Suharto, Edi. Konsep dan strategi Pengentasan Kemiskinan menurut Perspektif pekerjaan Sosial, artikel online, diakses tgl. 25 November 2009. [http://www.policy.hu/suharto/modul\\_a/makindo\\_13.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_13.htm).